



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

2017/11/29 14:02



Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu
Dan Perindustrian
Kabupaten Padang Pariaman

2017/11/29 13:13

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum.....	1
1. Kedudukan	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
3. Struktur Organisasi	2
B. Permasalahan Utama	3
C. Sistematika Laporan.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	5
1. Visi	
2. Misi	5
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017.....	6
C. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	9
B. Realisasi Anggaran	16
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	18
B. Langkah Kedepan	18
Lampiran Perjanjian Kinerja 2017	

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan dan meningkatkan investasi di Padang Pariaman. Oleh karena itu, melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTP) Pemerintah Kab.Padang Pariaman dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada investor dan masyarakat.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja maka disusun sebuah dokumen berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM DPMPTP

1. KEDUDUKAN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (BPMPPT) beralamat di Jalan Muhammad Syafei No.10 Pariaman No.Telp (0751) 4784539. Legalitas keberadaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati.

2. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman tertuang dalam *Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016* adalah sebagai berikut :

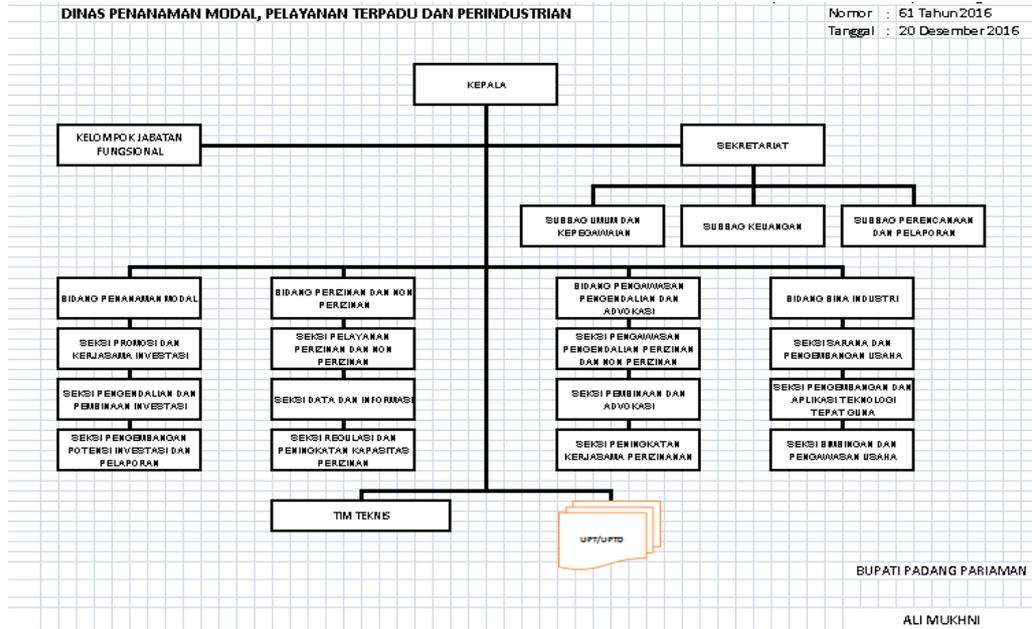
1. Tugas pokok dan fungsi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mempunyai *fungsi* sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;

- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
- f. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. STRUKTUR ORGANISASI



Tabel 1.1
Nama Pejabat di DPMPD Padang Pariaman

NO	NAMA	JABATAN
1	HENDRA ASWARA, SSTP, MM	Kepala Badan
2	RITA ANGGRAINI, S.Pd	Ka. Bagian Tata Usaha
3	JON EKA PUTRA, S.Sos, M.Si	Kabid Penanaman Modal
4	SEPNO FAHMI, SE	Kabid Pengend. & Pengawasan
5	HERI SUGIANTO, SH	Kabid Perizinan. & Non Periz.
6	TRISNA JUNAILI, ST	Kabid Bina Industri
7	BAKHTIAR JAMILIS, S.Sos	Kasubag. Umum dan Kepeg.
8	NISMAWATI MANZA, SE	Kasubag. Keuangan
9	ADE PRATAMA, SSTP, MM	Kasubag. Perenc. & Pelaporan
10	RESI HANDAYANI.R, SE	Kasi Promosi dan Kerjasama Investasi
11	DES ANDRIANI, S.Sos	Kasi Pengemb.Potensi Investasi dan Pelaporan
12	IBRAHIM	Kasi Pengendalian dan Pembinaan Investasi
13	SUHATMAN, ST	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

14	ADKUSNANDAR, SE	Kasi Data dan Informasi
15	SURYADI, SE	Kasi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan
16	BONI HENDRI, SH	Kasi Wasdal Perizinan dan Non Perizinan
17	NURTINI, SE	Kasi Pembinaan dan Advokasi
18	MUSLIM MARIUS	Kasi Peningkatan Kerjasama Perizinan
19	ISDAWATI, SE, MM	Kasi Sarana dan Pengembangan Usaha
20	ZIZI RISKI AKTAWIRA, ST	Kasi Pengembangan dan Aplikasi TTG
21	UJANG, B.Ac	Kasi Bimbingan dan Pengawasan Usaha

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

1. Belum disusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai Master Plan penyelenggaraan penanaman modal di Padang Pariaman
2. Perlunya disusun peraturan mengenai partisipasi perusahaan dalam penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR) di Padang Pariaman
3. Belum meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap kewajiban penyampaian Laporan Koordinasi Penanaman Modal (LKPM)
4. Belum selesainya perencanaan pembangunan sentra coklat Padang Pariaman
5. Belum selesainya perencanaan pembangunan kawasan industry kab.Padang Pariaman
6. Masih rendahnya tingkat penjualan produk hasil dari IKM

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTP Padang Pariaman Tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum BPMP2 Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja DPMPTP Tahun 2015

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja DPMPTP

Menyajikan capaian kinerja DPMPTP. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis DPMPTP sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DPMPTP. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja DPMPTP Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DPMPTP Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

DDinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 MELALUI RENSTRA DPMPTP 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi RENSTRA DPMPTP pada tahun 2017 merupakan periode kedua dari periode Renstra DPMPTP Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja DPMPTP tahun 2017, DPMPTP menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2017. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja DPMPTP Tahun 2017. Target-target kinerja DPMPTP Tahun 2017 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTP tahun 2017

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja DPMPTP Padang Pariaman Tahun 2016

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

DPMPTP KAB.PADANG PARIAMAN MENETAPKAN VISI 2016-2021, yaitu :
“Mewujudkan Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Berkualitas dan Akuntabel”.

Makna dari VISI tersebut adalah :

- 1) Peningkatan Investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menjadi penyelenggara dalam satu tempat yang telah terintegrasi dalam satu proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk.
- 2) PTSP yang berkualitas adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencerminkan suatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang transparan, tepat waktu, sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dan investor
- 3) PTSP yang akuntabel adalah penyelenggaraan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya maupun pemanfaatan outputnya

2. Misi

Misi DPMPTP terdiri dari :

1. Menciptakan Iklim Penanaman Modal Yang Lebih Kondusif
2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas
3. Mewujudkan industri kecil menengah yang berdaya saing dengan berbasis sumber daya lokal

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2017

Tujuan dan sasaran strategis DPMPTP untuk tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
Menciptakan Iklim Penanaman Modal Yang Lebih Kondusif	Meningkatnya iklim investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Meningkatnya investasi di Padang Pariaman	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (IKU)		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (IKU)
Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara profesional dan inovatif	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat
Mewujudkan industri kecil menengah yang berdaya saing dengan berbasis sumber daya lokal	Mewujudkan industri kecil menengah yang berdaya saing dengan berbasis sumber daya lokal	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Tumbuh dan berkembangnya industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah		Jumlah Industri Kecil dan Menengah
		Industri Unggulan Daerah	Meningkatnya jumlah sentra/klaser industry produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 termasuk untuk DPMPPT. IKU DPMPPT didukung oleh 3 Sasaran Strategis dengan 7 indikator kinerja yang

digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja DPMPTP Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017
	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
01.	Meningkatnya investasi di Padang Pariaman	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	45
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	145
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (IKU)	40
02.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	80
03	Tumbuh dan berkembangnya industry kecil menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2,42%
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah	1.300
04	Meningkatnya jumlah sentra/klaser industry produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	1

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kepala Daerah telah di tetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama DPMPTP Padang Pariaman tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTP akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja DPMPTP yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (Perjanjian Kinerja Terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja DPMPTP selama tahun 2017. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
>100	Sangat Berhasil
90< s.d ≤100	Berhasil
80<s.d. ≤90	Cukup Berhasil
70<s.d≤80	Kurang Berhasil
≤70	Tidak Berhasil

Sumber: Permendagri 54 Thn 2010 dan Keputusan Kepala LAN 293 Th 2003, diolah

A. Capaian Kinerja DPMPTP

Capaian kinerja DPMPTP tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja DPMPTP selama tahun 2017, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	2017		
				Target	Realisasi	%
1	2	3	4		5	6
	INDIKATOR KINERJA UTAMA					
01.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Padang Pariaman	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	11 Perusahaan	45 perusahaan	13 perusahaan	28,8
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Rp 604,69 M	Rp 145 M	Rp 183	126,2
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (IKU)	349,01%	40%	51%	127,5
02.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	68,41%	80%	73%	91,25
03	Tumbuh dan berkembangnya industry kecil menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2,92%	2,42	2,8%	116,67

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	2017		
				Target	Realisasi	%
1	2	3	4		5	6
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2115 buah	1300 buah	2176 buah	167,38
04	Meningkatnya jumlah sentra/klaser industry produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	0	1	1	100

Analisis dan evaluasi capaian kinerja DPMPPT tahun 2017 :

	<p>Sasaran 1: Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Padang Pariaman</p>
---	--

Dalam rangka menghitung pertumbuhan investasi di Kabupaten Padang Pariaman, DPMPPT Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)
3. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (IKU)

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	45 perusahaan	13 perusahaan	28,8	Tidak berhasil
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Rp 145 M	Rp 183	126,2	Sangat Berhasil
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	40%	51%	127,5	Sangat Berhasil

Berdasarkan Perka BKPM No.13 Tahun 2015 bahwa yang dimaksud investor berskala nasional adalah investor yang telah mempunyai Izin Usaha (IU) Penanaman Modal, dan terdaftar di database BKPM RI melalui aplikasi SPIPISE serta mempunyai nilai investasi di atas Rp 500 juta. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang dan jasa.

Ketidakberhasilan *indikator 1 (satu)* disebabkan karena hanya 13 (tiga belas) perusahaan yang mengurus/mempunyai/miliki/ Izin Usaha (IU) Penanaman Modal dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah). Perusahaan tersebut adalah 13 (tiga belas) PMDN, sedangkan PMA tidak ada. Solusi kedepan agar meningkatnya jumlah investor berskala nasional adalah mendorong perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal untuk segera mengurus dan memiliki Izin Usaha jika perusahaan

tersebut telah beraktifitas maupun memproduksi, kemudian meningkatkan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kepada perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip. Namun Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 dimana hanya 11 perusahaan, jumlah investor berskala nasional mengalami kenaikan sebanyak 2 (dua) perusahaan.

Untuk indikator 2 (dua), jumlah nilai investasi berskala nasional dari target Rp 145 M mencapai realisasi Rp 183 M dengan persentase capaian 126,2 %. Nilai ini dihitung berdasarkan realisasi investasi perusahaan baik PMA maupun PMDN. Dengan rincian PMDN sebesar Rp 174.733.400.000,- dan PMA sebesar Rp 8.408.400.000,-. Keberhasilan ini karena meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Padang Pariaman, sehingga banyak perusahaan yang menambah dan meningkatkan investasinya, kemudian kebijakan pemerintah pusat yang pro investasi, seperti pencabutan Izin Gangguan (HO) dan retribusinya, selanjutnya meningkatnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan investasi melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online, dan terakhir DPMPTP melalui bidang Penanaman Modal terus berupaya melakukan pembinaan secara intensif kepada perusahaan tentang cara pembuatan dan pelaporan LKPM secara online. Dibandingkan dengan tahun 2016 untuk realisasi indikator ini memang mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 juga dihitung nilai investasi berdasarkan Izin Prinsip. Namun pada awal tahun 2017 setelah dilakukan koordinasi dan pertemuan dengan BKPM RI melalui Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan, bahwa untuk nilai investasi dihitung berdasarkan realisasi investasi perusahaan baik melalui Izin Usaha maupun LKPM. Jadi jika dihitung kembali, untuk nilai investasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 121 Miliar.

Untuk Indikator 3 (tiga) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi. Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Nilai Investasi Tahun ini} - \text{Nilai Investasi Tahun sebelumnya}}{\text{Nilai Investasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\% \\ &= \frac{183 - 121}{121} \times 100\% \\ &= 51\% \end{aligned}$$

Sama halnya dengan indikator 2 (dua) Keberhasilan ini karena meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Padang Pariaman, sehingga banyak perusahaan yang menambah dan meningkatkan investasinya, kemudian kebijakan pemerintah pusat yang pro investasi, seperti pencabutan Izin Gangguan (HO) dan retribusinya, selanjutnya meningkatnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan investasi melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online, dan terakhir DPMPTP melalui bidang Penanaman Modal terus berupaya melakukan pembinaan secara intensif kepada perusahaan tentang cara pembuatan dan pelaporan LKPM secara online.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



 **Sasaran 2:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam rangka menghitung peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat. DPMPTP sebagai pelaksana PTSP di Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja			Capaian 2017			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
Persentase Masyarakat	Tingkat	Kepuasan	80%	73%	91,25	Berhasil

Persentase tingkat kepuasan masyarakat dihitung melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemda Padang Pariaman melalui Bagian Organisasi Setdakab Padang Pariaman bekerjasama dengan Tim PSKP Unand. Survey dilakukan terhadap masyarakat dan investor yang sedang dan pernah mengurus perizinan melalui DPMPTP Padang Pariaman. Dibandingkan dengan tahun 2016 nilai IKM untuk DPMPTP mengalami kenaikan, walaupun belum menyentuh nilai 76% sebagai nilai minimal untuk mendapatkan nilai B. Padahal tahun 2017 DPMPTP telah mulai berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti pelayanan perizinan secara elektronik melalui aplikasi SIPADU, merevisi berbagai peraturan dan kebijakan, merevisi SOP dan Standar Pelayanan, rehabilitasi ruangan pelayanan, transparansi biaya, disiplin pegawai, keramahan petugas dan berbagai indikator pelayanan publik yang berkualitas lainnya. Keberadaan tim teknis yang masih belum berada di PTSP menjadi kendala dalam proses perizinan yang membutuhkan rekomendasi dan survey ke lapangan sehingga terkadang menjadi keterlambatan dalam proses perizinan, serta belum adanya pelimpahan kewenangan penandatanganan SK perizinan kepada Sekretaris jika pimpinan OPD tidak berada di tempat atau jika pimpinan melakukan perjalanan dinas luar daerah. Kedepan DPMPTP melalui Bidang Perizinan dan Non perizinan telah berkomitmen akan mempercepat proses perizinan masyarakat, karena hal ini juga telah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Sehingga akan meningkatkan kualitas kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan perizinan. Program yang mendukung sasaran dan indikator ini adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan.



 **Sasaran 3: Tumbuh dan berkembangnya industri kecil menengah**

Untuk menghitung tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah di Kabupaten Padang Pariaman. DPMPTP telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. **Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)**
2. **Jumlah Industri Kecil dan Menengah**

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	2,42%	2,8%	116,67	Sangat Berhasil
Jumlah Industri Kecil dan Menengah	1300 buah	2176 buah	167,38	Sangat Berhasil

Untuk Indikator Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah IKM Tahun ini} - \text{Jumlah IKM Tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah IKM Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{2176 - 2115}{2115} \times 100\% = 2,8\%$$

Kemudian untuk indikator kedua, Jumlah Industri Kecil dan menengah. Pada tahun 2017 jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Padang Pariaman adalah 2176 buah IKM. Jumlah ini meningkat dari tahun 2016 yang berjumlah 2115 buah IKM.

Keberhasilan kedua indikator diatas karena Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaaman berhasil menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan perkembangan industri kecil dan menengah sehingga

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini juga disebabkan karena DPMPTP melalui Bidang Bina Industri terus menerus secara intensif melakukan pembinaan terhadap IKM, kemudian DPMPTP juga memfasilitasi pemberian kemudahan izin usaha IKM berupa fasilitasi perizinan PIRT, sertifikat halal, SNI, MD untuk IKM pangan, fasilitasi kerjasama IKM dengan mitra atau pengusaha besar. Dengan terjalinnya kemitraan ini diharapkan akan membuka akses IKM terhadap teknologi, modal dan pemasaran.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri



 **Sasaran 4: Meningkatnya jumlah sentra/klaster industry produk unggulan daerah**

DPMPTP telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah sentra/klaster industri produk unggulan daerah. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Jumlah Industri Unggulan Daerah

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Jumlah Industri Unggulan Daerah	1 buah	1 buah	100	Berhasil

Pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kab.Padang Pariaman melalui DPMPTP berhasil menjadikan Sentra Coklat di Malibou Anai sebagai industri unggulan daerah. Kawasan/sentra ini berkonsep eduwisata yakni sentra IKM coklat yang menggabungkan layanan wisata dengan nilai pendidikan tentang pengolahan biji coklat dari hulu ke hilir.

Program yang mendukung sasaran dan indikator ini adalah Program Penataan Struktur Industri



B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada DPMPTP Padang Pariaman, sumber pendanaan pada DPMPTP hanya bersumber dari APBD Padang Pariaman, dan tidak ada sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, pinjaman maupun dana Tugas Pembantuan.. Realisasi keuangan yang mendukung sasaran dan indikator kinerja DPMPTP Padang Pariaman Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
A	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Padang Pariaman				
1.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
	Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	30.000.000,-	29.834.000,-	166.000,-	99
2.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				
	Penjajakan Investasi dan Promosi	215,000,000,-	213,356,850,-	1.643.150,-	99
	Penyusunan Buku Potensi dan data investasi	25,000,000,-	24,748,800,-	251.000,-	99
	Pemantauan, Pengendalian, Pembinaan dan Peningkatan SDM Perusahaan OnlineLKPM	62,995,444,-	61,992,300,-	1.003.144	98
B	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu				
	Operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40,000,000,-	38,682,200,-	1.317.800,-	97

	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	53,000,000,-	52,794,500,-	205.500,-	100
	Pengadaan Buku Pedoman dan Papan Informasi Pelayanan Perizinan	73,000,000,-	72,916,000,-	84.000,-	100
	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Perizinan	65,000,000,-	64,505,100,-	494.900,-	99
C	Tumbuh dan berkembangnya industry kecil menengah				
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
	Pemberian Kemudahan izin usaha industry kecil dan menengah	36,060,000,-	36,042,500,-	17.500,-	99
	Peningkatan dan pengembangan mutu produk industry kecil daerah serta pengawasan pembinaan IKM	73,444,818,-	73,444,500,-	318,-	100
	Lanjutan Pengembangan Industri Cokelat	248,940,000,-	247,218,033,-	1.721.967,-	99
2.	Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri				
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	83,800,000,-	83,003,542,-	796.458,-	99
	Perluasan Penerapan Standar Produk industry manufaktur	80,000,000,-	79,832,050,-	167.950,-	99
D	Meningkatnya jumlah sentra/klaster industry produk unggulan daerah				
1.	Program Penataan Struktur Industri				
	Pengembangan Potensi Kawasan Industri	58,371,182,-	57,919,600,-	451.582,-	99
	TOTAL	1.144.611.444,-	1.136.289.975,-	8.321.469,-	99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja DPMPTP Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh DPMPTP Tahun 2017 adalah :

- 1) Pencapaian target PAD lebih dari 100%
- 2) Pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan ke DPMPTP sebagai pelaksana PTSP
- 3) Melakukan berbagai inovasi seperti menggunakan aplikasi SIPADU dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan aplikasi LKPM Online untuk penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMA/PMDN,
- 4) Meningkatnya Realisasi Investasi
- 5) Menjadikan sentra coklat di Kawasan Malibou Anai menjadi Industri Unggulan Daerah

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2017 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2017 ini.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja DPMPTP pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Merancang suatu sistem data base untuk arsip perizinan melalui teknologi informasi
- 2) Promosi potensi investasi melalui pelaksanaan SIPID (Sistem informasi Potensi Investasi Daerah)
- 3) Menjadikan dan meningkatkan sentra-sentra IKM menjadi industri unggulan daerah
- 4) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja melalui Diklat Teknis maupun struktural

Demikian Laporan Kinerja Instansi DPMPTP Tahun 2017 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program DPMPTP Tahun 2017.

Semoga Allah SWT memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, Maret 2018
Kepala DPMPTP Padang Pariaman

Hendra Aswara, SSTP,MM
Pembina / NIP.19810926 199912 1 001